

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Jensen and Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi sebagai suatu kontrak dibawah satu atau lebih principal yang melibatkan agent untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agent. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*". Implikasi penerapan teori ini dapat menimbulkan perilaku efisiensi atau perilaku opportunistik agen. Pada organisasi publik khususnya di pemerintahan daerah secara sadar atau tidak, teori keagenan ini telah dipraktikkan, termasuk pemerintahan daerah di Indonesia dalam mewujudkan transparansi akuntabilitas publik.

Menurut Mardiasmo (2004), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agensi/Pemerintah) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal/Masyarakat) yang memiliki hak untuk

meminta pertanggung jawaban tersebut.

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu:

- a. pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertical), dan
- b. pertanggung jawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunistik dan cenderung tidak menyukai risiko. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Sehingga tujuan pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas baik di lembaga pusat khususnya daerah akan dapat terwujud.

## **2. Laporan Keuangan**

### **a. Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban pengelolaan atas pengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. (Riandani, 2017)

Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

### **b. Tujuan Laporan Keuangan**

★ Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan (Riandani, 2017).

Adapun Tujuan penyusunan laporan keuangan pada PP No.71 Tahun 2010 paragraph 23 disebutkan bahwa, laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang

dipercayakan kepadanya, dengan cara:

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

### c. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggung jawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi (Riandani, 2017).

Adapun laporan keuangan dapat dikatakan sudah berkualitas jika bisa memenuhi beberapa syarat karakteristik kualitas sesuai PP No.71 Tahun 2010, yaitu:

#### 1) Relevan

Laporan keuangan biasanya dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

#### 2) Andal

Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi-informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin

relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

### 3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

### 4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

### 3. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan berpedoman pada SAP, maka diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara relevan dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. *Huang et al.*, (1999) dalam Sukmaningrum (2012: 3) menyatakan bahwa informasi akan bermanfaat apabila suatu informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai.

Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Oleh karena itu orang yang bertugas untuk menyajikan laporan keuangan suatu instansi haruslah paham tentang aturan ataupun standar pelaporan keuangan yang berlaku sehingga laporan keuangan yang dibuat

berkualitas dan sesuai dengan standar yang berlaku. Menurut Desiana (2014) bahwa laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Dengan kata lain, unsur pemahaman terhadap SAP berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

#### **4. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah**

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Menurut Halim (2014), penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, prosedur akuntansi asset yang baik, sehingga akan menghasilkan penatausahaan keuangan daerah yang memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif.

Pada dasarnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pemerintah Daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang

diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan (PPK)-SKPD. Sistem akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas dan prosedur akuntansi asset (Halim, 2014).

## **5. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Perkembangan teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi (jaringan dan komputer) memberikan banyak keunggulan baik pada sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi dan predikatnya sebagai mesin multiguna. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mengurangi kesalahan yang terjadi (Silaban, 2017).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi agar dapat meningkatkan kemampuan mengelola

keuangan daerah, maupun menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan komputer, software/perangkat lunak, dan lainnya yang sejenis secara optimal. Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Silaban, 2017).

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan jelas sangat nyata sejak awal proses penganggaran hingga pertanggungjawaban laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud seperti penggunaan komputer dan perangkat lunak secara optimal, akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan perhitungannya juga akan memiliki tingkat keakurasian yang tinggi sehingga akan berujung pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang lebih andal karena pemanfaatan teknologi akan mengurangi kesalahan yang bersifat material (Primayana, 2014).

Penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi dapat mempengaruhi kepuasan pengguna laporan keuangan karena kualitas, kecepatan dan keakuratan data yang terdapat dalam laporan keuangan bersangkutan. Dengan memanfaatkan segala teknologi informasi yang terdiri dari hardware, software, database, jaringan dan lain sebagainya yang semakin canggih dan dapat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sistem informasi kian mampu membantu meminimalisir

setiap faktor salah saji material mulai dari proses transaksional sampai pada penyajian laporan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat dan andal (Silaban, 2017).

## 6. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah perpaduan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik pribadi lainnya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pekerjaan, yang bisa diukur dengan menggunakan standar yang telah disepakati, dan yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan. Kompetensi meliputi aspek *intent* (niat), *action* (tindakan), dan *outcome* (hasil) (Marwansyah, 2012).

Didalam keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Sipil No. 46A tahun 2003 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Menurut Spencer (1993) kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu (A

*competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion referenced effective and or superior performance in a job or situation).*

Kemampuan sumber daya manusia adalah kapasitas seseorang atau individu, suatu organisasi/kelembagaan, atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi akan menentukan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah setiap sumber daya manusianya harus memiliki pemahaman yang baik tentang pekerjaannya seperti pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan yang menjadi prinsip dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Rafid, 2016).

Menurut Desiana dkk (2014) Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin

cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai pendukung dalam proses penelitian baik sebagai acuan maupun sebagai referensi. Untuk lebih jelas dibawah ini beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian kami yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1 : Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1	Rafid, Rashwan Zuhudy	2016	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada pemerintahan Kabupaten Bone)	Pemahaman SAP berpengaruh positif dan signifikan, Kompetensi SDM berhasil memberikan nilai tambah kepada pengaruh pemahaman SAP terhadap kualitas laporan keuangan

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti	Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
2	Devi Roviyantie	2012	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	kompetensi sumber daya manusia dalam memahami akuntansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3	Maeka Sari, dkk	2014	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas Di Pemerintah Kabupaten Jembrana)	Pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4	Linna Yuliana	2016	Pengaruh Pemahaman SAP, Pengalaman Kerja Dan Sia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo)	Pemahaman SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti	Tahun Penelitian	Judul	Hasil Peneliti
5	Putriasri Pujanira	2017	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kompetensi SDM dan Penerapan SAKD berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah DIY
6	Desiana Wati, dkk	2014	Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kompetensi SDM dan SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
7	Rahmawati, Astika, dkk	2018	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti	Tahun Penelitian	Judul	Hasil Peneliti
8	Nur Evelyn Jelita Silaban	2017	Pengaruh Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel moderating	Hasil penelitiannya pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
9	Suprihastini, Eka., Akram dan Budi Santoso	2017	Effect Of Regional Financial Accounting System, Internal Control Systems And Regional Financial Audit On Financial Accountability Of Local Government	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah
10	Zahara, G dan Silviana	2015	The influence of Competence Local Government Agencies and The Implementation Government of Internal Control System toward the Quality of Local Government Financial Statement	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi petugas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

### C. Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai

posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Pramudiarta, 2015). Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Megawati, 2015).

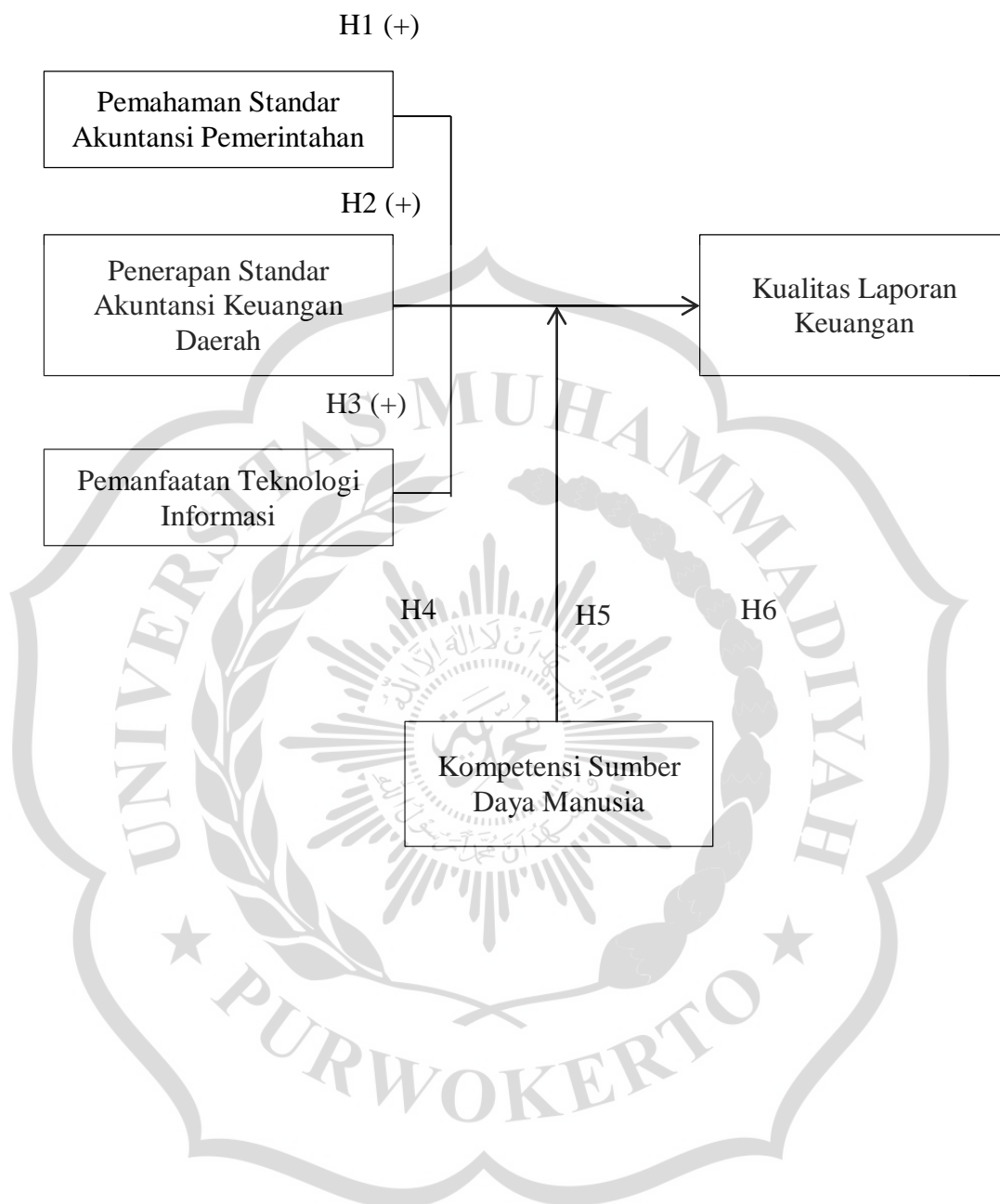
Menurut Sari dkk (2014) jika pegawai pengelola keuangan semakin paham terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maka kualitas laporan keuanganpun akan semakin baik. Asumsi *Agency Theory* yang memposisikan pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah yang berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (Masyarakat) dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas agar kinerja pemerintah dianggap maksimal oleh masyarakat.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah juga diperlukan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang didasarkan atas Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,

sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Menurut Halim (2014), penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, prosedur akuntansi asset yang baik, sehingga akan menghasilkan penatausahaan keuangan daerah yang memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif.

Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan factor pendukung untuk menciptakan terwujudnya laporan pertanggungjawaban keuangan yang memiliki ketepatanwaktuan dalam penyajian serta dapat diandalkan nilai informasi didalamnya. Memanfaatkan Teknologi Informasi dengan baik maka akan meningkatkan kinerja serta menghasilkan hasil yang baik pula yakni berupa laporan keuangan yang berkualitas. Sejalan dengan *Agency Theory* bahwa pemerintah, pihak yang diberikan amanah oleh masyarakat berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (Masyarakat) dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas agar kinerja pemerintah dianggap baik.

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran



## D. Hipotesis

### 1. Pemahaman SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemahaman pegawai terhadap standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Bukti adanya pengaruh kemampuan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dikemukakan oleh Rahmayati (2012) yang mengemukakan bahwa penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikannya, yaitu pegawai yang berlatar belakang pendidikan ekonomi akuntansi sebagai staf penyusun laporan keuangan akan menjadikan laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

Rafid (2016), Sari, dkk (2014) dan Yuliana (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah. Maka hubungan antara Pemahaman SAP dengan kualitas laporan keuangan dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

*H<sub>1</sub> : Pemahaman SAP berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan*

## **2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Halim (2014), penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, prosedur akuntansi asset yang baik, sehingga akan menghasilkan penatausahaan keuangan daerah yang memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif.

Dalam penelitian Roviyantie (2012), Pujanira (2017) dan Ihsanti (2014) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian oleh Luh Kadek Sri, dkk (2015) yang menyimpulkan bahwa Penerapan SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Maka hubungan antara Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan dapat dihipotesiskan:

*H<sub>2</sub> : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan*

### **3. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan komputer, software/perangkat lunak, dan lainnya yang sejenis secara optimal. Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Silaban, 2017).

Suatu entitas akuntansi seperti pemerintah daerah, sudah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi pasti akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (Jogiyanto, 2008).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Silaban (2017), Astika, dkk (2018) dan Nadir, Rasyidah dan Hasyim (2017) menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Maka hubungan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kualitas Laporan Keuangan dapat dihipotesiskan:

*H<sub>3</sub> :Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan*

#### **4. Kompetensi SDM terhadap hubungan antara Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Kualitas Laporan Keuangan**

Selain diperlukannya pemahaman terhadap SAP, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah Kompetensi Sumber Daya Manusianya. Sebagai mana dalam penelitian Desiana dkk (2014) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini didukung oleh penelitian Rovianti (2012) yang menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia konsisten berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu selain pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan (SAP) faktor lain yang tidak bisa dikesampingkan yaitu kompetensi dari sumber daya manusia itu sendiri, dalam penelitian ini diharapkan kompetensi sumber daya manusia mampu memperkuat atau memoderasi variabel pemahaman SAP terhadap kualitas laporan keuangan, jadi hipotesis yang diambil adalah *H<sub>4</sub>: Kompetensi SDM berpengaruh positif dan memoderasi hubungan antara Pemahaman SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan*

## **5. Kompetensi SDM terhadap hubungan antara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan**

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam penelitian Desiana, dkk (2014) variabel SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan penelitian ini didukung oleh penelitian Pujanira (2017) menunjukkan hasil penelitian dengan variabel Kompetensi SDM dan Penerapan SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah DIY.

Penerapan sistem informasi akuntansi tentu harus didukung dengan pegawai yang mampu mengoperasikan dan memahami sistem yang diterapkan tersebut untuk penyusunan laporan keuangan, semakin baik kompetensi sumberdaya manusianya diharapkan memahami dan menjalankan sistem serta mengoperasikan aplikasi atau sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah daerah. Dalam penelitian ini diharapkan variabel moderasi yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia Mampu memperkuat atau memoderasi hubungan antara penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jadi hipotesis selanjutnya yang dapat diambil adalah  $H_5$  : *Kompetensi SDM berpengaruh positif dan memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan*

## **6. Kompetensi SDM terhadap hubungan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kualitas Laporan Keuangan**

Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan komputer, software/perangkat lunak, dan lainnya yang sejenis secara optimal. Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Silaban, 2017).

Dalam penelitian Astika, dkk (2018) variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD kota Tangerang Selatan penelitian ini didukung oleh penelitian Silaban (2017) menunjukkan hasil penelitian dengan variabel Kompetensi SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Serdang Berdagai.

★ Berdasarkan dua penelitian diatas bahwa faktor teknologi mampu mendukung dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas sehingga mampu digunakan oleh pengguna laporan tersebut serta mampu dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan Teknologi Informasi tentu harus didukung dengan pegawai yang mampu mengoperasikan dan memahami sistem yang diterapkan tersebut untuk penyusunan laporan keuangan, semakin baik kompetensi sumberdaya manusianya diharapkan memahami dan menjalankan sistem serta mengoperasikan aplikasi atau sistem akuntansi yang digunakan oleh

pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini diharapkan variabel moderasi yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia Mampu memperkuat atau memoderasi hubungan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jadi hipotesis selanjutnya yang dapat diambil adalah  $H_6$  : *Kompetensi SDM berpengaruh positif dan memoderasi hubungan antara Pemanfaatan Teknologi informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan*

